

Integrasi Nilai Keislaman dalam Tata Kelola Kebijakan Sosial pada Masyarakat Multikultural: Perspektif Islam Lokal di Kota Padangsidempuan

Riski Hastuti Ritonga¹, Nur Azizah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
qqfrera@yahoo.com¹, nurazizah@uinsyahada.ac.id²

ABSTRACT

This article examines the integration of Islamic values into social policy governance within the multicultural society of Padangsidempuan City. This research uses a qualitative approach with empirical methods through interviews, observations, and analysis of local policy documents. The results indicate that Islamic values such as justice, welfare, deliberation, and social solidarity have been internalized in the practice of local government social policies, although they have not been explicitly formalized in regulations. The integration of local Islamic values serves as a foundation for social ethics that strengthens policy legitimacy and maintains harmony within a multicultural society. This research confirms that local Islam has a strategic contribution to strengthening social policy at the local level.

Keywords: *Islamic Values, Social Policy, Multiculturalism.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas integrasi nilai-nilai keislaman dalam tata kelola kebijakan sosial pada masyarakat multikultural di Kota Padangsidempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode empiris melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen kebijakan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman seperti keadilan, kemaslahatan, musyawarah, dan solidaritas sosial telah terinternalisasi dalam praktik kebijakan sosial pemerintah daerah, meskipun belum diformalkan secara eksplisit dalam regulasi. Integrasi nilai Islam lokal berperan sebagai basis etika sosial yang memperkuat legitimasi kebijakan dan menjaga harmoni masyarakat multikultural. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam lokal memiliki kontribusi strategis dalam penguatan kebijakan sosial di tingkat lokal.

Kata kunci : *Nilai Keislaman, Kebijakan Sosial, Multikulturalisme.*

PENDAHULUAN

Kebijakan sosial merupakan salah satu instrumen negara yang memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan masyarakat. Ia tidak hanya mengatur distribusi kesejahteraan, penanganan kelompok rentan, dan resolusi konflik sosial, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai yang dianut oleh negara dan masyarakat tempat kebijakan tersebut diterapkan. Dalam masyarakat yang bersifat homogen, kebijakan sosial relatif mudah diterima karena bertumpu pada sistem nilai yang seragam. Namun, dalam masyarakat multikultural, kebijakan sosial menghadapi tantangan

yang lebih kompleks karena harus berhadapan dengan keberagaman identitas, kepentingan, dan orientasi nilai sosial. (Khilmi dkk., 2024)

Indonesia sebagai negara dengan tingkat pluralitas yang tinggi menghadirkan realitas sosial yang tidak sederhana dalam pengelolaan kebijakan sosial. Perbedaan etnis, agama, dan budaya sering kali berkelindan dengan persoalan ekonomi dan politik lokal, sehingga kebijakan sosial tidak jarang menjadi arena kontestasi kepentingan. Dalam situasi demikian, kebijakan sosial yang disusun secara teknokratis dan berorientasi administratif berpotensi kehilangan legitimasi sosial apabila tidak mampu menyerap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. (Gantika, 2025) Oleh karena itu, pendekatan kebijakan sosial yang sensitif terhadap konteks kultural dan keagamaan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.

Kota Padangsidempuan merupakan salah satu wilayah yang merepresentasikan dinamika masyarakat multikultural di tingkat lokal. Kota ini tumbuh dalam persilangan berbagai kelompok etnis seperti Batak Angkola, Mandailing, Minangkabau, dan Jawa, serta dihuni oleh komunitas agama yang beragam. Islam menjadi agama mayoritas, namun praktik keberagaman masyarakat tidak berkembang dalam ruang yang terisolasi, melainkan dalam interaksi yang intens dengan adat, tradisi, dan struktur sosial lokal. Interaksi tersebut membentuk corak keberagaman yang khas dan kontekstual, yang dalam kajian keislaman kontemporer dikenal sebagai Islam lokal. (Azra, 2015, hlm. hlm. 19-22.)

Islam lokal di Padangsidempuan tidak hanya hadir dalam bentuk ritual keagamaan, tetapi juga termanifestasi dalam nilai-nilai sosial yang memengaruhi cara masyarakat memandang keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif. Nilai musyawarah, tolong-menolong, dan kepedulian sosial menjadi bagian dari etos sosial yang hidup dan dipraktikkan lintas generasi. Dalam konteks ini, Islam lokal berfungsi sebagai sumber etika sosial yang mampu menjembatani perbedaan identitas dan memperkuat kohesi masyarakat multikultural.

Dalam praktik pemerintahan daerah, nilai-nilai keislaman tersebut tidak selalu diartikulasikan secara eksplisit dalam bentuk regulasi formal atau kebijakan berbasis agama. Namun, nilai-nilai tersebut kerap hadir secara implisit dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan sosial, baik melalui mekanisme musyawarah, pelibatan tokoh agama dan adat, maupun pendekatan persuasif dalam penyelesaian persoalan sosial. (Aziz & Mutakin, 2025) Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi nilai keislaman dalam kebijakan sosial tidak selalu berlangsung dalam bentuk formalisasi, melainkan melalui internalisasi nilai yang bersifat substantif. (Noeri & Hoesein, 2025)

Meskipun demikian, kajian akademik yang secara khusus menelaah integrasi nilai keislaman dalam tata kelola kebijakan sosial pemerintah daerah masih relatif terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan empiris dan berfokus pada konteks lokal. Sebagian kajian cenderung menempatkan Islam dalam posisi normatif atau ideal, tanpa menelusuri bagaimana nilai-nilai tersebut bekerja dalam praktik

kebijakan sehari-hari. Akibatnya, pemahaman mengenai peran Islam lokal dalam penguatan kebijakan sosial sering kali bersifat abstrak dan kurang membumi. (Abdurrahman Wahid, 2017, hlm. hlm. 52.)

Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini berupaya mengisi celah kajian dengan menganalisis integrasi nilai-nilai keislaman dalam tata kelola kebijakan sosial pada masyarakat multikultural di Kota Padangsidempuan. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana nilai-nilai keislaman sebagaimana hidup dalam Islam lokal diartikulasikan dalam kebijakan sosial pemerintah daerah, serta bagaimana nilai-nilai tersebut berkontribusi terhadap terciptanya harmoni sosial. Dengan pendekatan mendalam, artikel ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai relasi antara agama, kebijakan sosial, dan multikulturalisme di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian empiris (*field research*). (Zuchri Abdussamad, 2021, hlm. hlm. 30-43.) Penelitian ini bersifat deskriptif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. (Kasiran, 2018, hlm. hlm. 151.) Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparatur pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Kota Padangsidempuan. Selain itu, observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan sosial daerah digunakan untuk melengkapi data penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologis untuk memahami integrasi nilai keislaman dalam praktik kebijakan sosial. (Sutrisno Hadi, 2019, hlm. hllm. 11.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Nilai Keislaman dalam Formulasi Kebijakan Sosial Pemerintah Daerah

Integrasi nilai-nilai keislaman dalam formulasi kebijakan sosial Pemerintah Kota Padangsidempuan tidak dapat dipahami sebagai proses normatif yang linear atau formalistik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai keislaman tidak diartikulasikan secara eksplisit dalam bentuk simbol, istilah syariat, atau regulasi bercorak agama, melainkan hadir sebagai kerangka etik yang membimbing cara pandang aparatur pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial. Hal ini menandai pergeseran penting dari pendekatan legal formal menuju pendekatan substantif dalam relasi antara Islam dan kebijakan publik. (Aravik dkk., 2023)

Aparatur pemerintah daerah, Ginda Daulay, S.E., menjelaskan bahwa dalam perumusan kebijakan sosial, pemerintah daerah berangkat dari realitas sosial masyarakat yang majemuk. Oleh karena itu, nilai-nilai keislaman yang dijadikan rujukan adalah nilai yang bersifat universal, seperti keadilan sosial, kepedulian terhadap kelompok rentan, dan kemaslahatan bersama. Nilai-nilai tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program-program sosial tanpa harus dilekatkan secara simbolik pada identitas agama tertentu. Pendekatan ini mencerminkan

kesadaran birokrasi lokal terhadap kompleksitas masyarakat multikultural serta potensi resistensi apabila kebijakan sosial terlalu kental dengan simbol keagamaan. (Ginda Daulay, komunikasi pribadi, t.t., hlm. Pada 5 Januari Pukul 11.15 Wib.)

Dalam perspektif teori kebijakan publik berbasis nilai, pendekatan ini menunjukkan bahwa agama dapat berfungsi sebagai moral compass bagi negara tanpa harus menjadi sumber legitimasi hukum secara langsung. Islam dalam konteks ini berfungsi sebagai sumber inspirasi etik, bukan sebagai sistem normatif yang dipaksakan secara struktural. Pola semacam ini sejalan dengan gagasan *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan tujuan-tujuan kemanusiaan sebagai inti ajaran Islam, bukan sekadar penerapan norma formal. (Shihab, 2007, hlm. hlm. 412–416.) Dengan demikian, integrasi nilai keislaman dalam kebijakan sosial tidak diukur dari seberapa banyak simbol agama yang muncul, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut menghadirkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Lebih jauh, integrasi nilai keislaman dalam formulasi kebijakan sosial juga tampak pada cara pemerintah daerah memandang kelompok rentan sebagai subjek utama kebijakan. Program bantuan sosial, penanganan konflik, dan respons terhadap bencana dirancang dengan mempertimbangkan aspek empati dan perlindungan sosial. Pendekatan ini merefleksikan prinsip Islam tentang tanggung jawab kolektif terhadap sesama manusia (*al-mas'uliyah al-ijtima'iyyah*). (Rikantasari & Kholishudin, 2025) Dalam praktiknya, nilai ini mendorong aparat pemerintah untuk tidak semata-mata menjalankan kebijakan secara administratif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis kebijakan tersebut.

Namun demikian, integrasi nilai keislaman dalam kebijakan sosial tidak berlangsung tanpa negosiasi. Pemerintah daerah harus terus-menerus menyeimbangkan antara aspirasi kelompok mayoritas Muslim dan kebutuhan menjaga inklusivitas dalam masyarakat multikultural. Dalam konteks ini, pilihan untuk menekankan nilai substantif daripada simbolik merupakan strategi kebijakan yang rasional dan kontekstual. (Susanti, 2022) Strategi ini memungkinkan nilai Islam tetap hadir sebagai roh kebijakan tanpa menciptakan eksklusivitas atau ketegangan sosial.

Dengan demikian, integrasi nilai keislaman dalam formulasi kebijakan sosial di Kota Padangsidempuan dapat dipahami sebagai praktik Islam lokal dalam ranah pemerintahan. Islam tidak tampil sebagai ideologi negara, melainkan sebagai etika publik yang hidup dan berinteraksi dengan realitas sosial. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa relasi Islam dan negara di tingkat lokal sering kali lebih cair dan pragmatis dibandingkan dengan wacana normatif di tingkat nasional.

Peran Islam Lokal dalam Pengelolaan Konflik Sosial di Masyarakat Multikultural

Islam lokal di Kota Padangsidempuan memainkan peran strategis dalam pengelolaan konflik sosial, khususnya dalam konteks masyarakat multikultural.

Berdasarkan temuan lapangan, konflik sosial yang muncul baik yang bersumber dari perbedaan kepentingan, kesalahpahaman antarwarga, maupun dinamika sosial ekonomi jarang diselesaikan melalui pendekatan koersif semata. Sebaliknya, pendekatan persuasif berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal lebih dominan digunakan.

Tokoh agama Sofyan Souri Siregar menegaskan bahwa peran ulama dan tokoh agama dalam penyelesaian konflik tidak hanya bersifat simbolik, tetapi substantif. Mereka berfungsi sebagai mediator moral yang memiliki legitimasi sosial kuat di mata masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah, nasihat keagamaan, dan pendekatan kekeluargaan. Pendekatan ini mencerminkan praktik Islam lokal yang menempatkan perdamaian (*sulh*) dan harmoni sosial sebagai tujuan utama kehidupan bermasyarakat. (Sofyan Souri, komunikasi pribadi, t.t., hlm. Pada 5 Januari Pukul 16.30 Wib.)

Islam lokal dalam konteks ini tidak identik dengan pemahaman Islam tekstual yang kaku. Ia berkembang melalui interaksi panjang antara ajaran Islam dan budaya lokal, sehingga melahirkan praktik keberagamaan yang lentur dan adaptif. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan Islam berfungsi sebagai perekat sosial di tengah pluralitas. Sebagaimana ditegaskan oleh Azra, Islam lokal di Indonesia memiliki kemampuan tinggi untuk beradaptasi dengan konteks sosial tanpa kehilangan substansi ajarannya. (Azra, 2015, hlm. hlm. 95-99.)

Pemerintah daerah menyadari kekuatan sosial Islam lokal ini dan secara aktif melibatkan tokoh agama dalam proses pengelolaan konflik. Kolaborasi antara pemerintah dan tokoh agama menunjukkan bahwa negara tidak selalu harus menjadi aktor tunggal dalam resolusi konflik. Sebaliknya, keterlibatan aktor non-negara yang memiliki legitimasi kultural justru meningkatkan efektivitas kebijakan sosial. Model ini memperlihatkan praktik *collaborative governance* berbasis nilai lokal. (Indrayanti dkk., 2025)

Dalam masyarakat multikultural, peran Islam lokal sebagai mekanisme resolusi konflik juga berfungsi sebagai penyangga terhadap potensi fragmentasi sosial. Islam lokal tidak memaksakan identitas, tetapi menawarkan nilai-nilai moral yang dapat diterima lintas kelompok. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai sumber integrasi sosial, bukan sebagai pemicu konflik. Temuan ini menantang anggapan bahwa agama selalu menjadi faktor destabilitas dalam masyarakat plural.

Kebijakan Sosial dan Penanganan Bencana Berbasis Nilai Keislaman

Dalam konteks penanganan bencana dan krisis sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman memainkan peran penting sebagai landasan etis dalam membangun solidaritas sosial dan memperkuat respons kebijakan pemerintah daerah. Nilai-nilai seperti tolong-menolong (*ta'awun*), empati (*rahmah*), dan tanggung jawab kolektif (*mas'uliyah ijtimaiyyah*) tidak hanya hadir sebagai ajaran normatif, tetapi terinternalisasi dalam praktik sosial masyarakat dan mekanisme kebijakan pemerintah daerah. (Anwar dkk., 2025) Hal ini menunjukkan

bahwa nilai keislaman berfungsi sebagai sumber daya moral yang efektif dalam menghadapi situasi krisis.

Aparatur pemerintah daerah menegaskan bahwa kebijakan sosial dalam penanganan bencana dirancang tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan administratif dan teknis, tetapi juga untuk menjawab kebutuhan sosial dan kemanusiaan masyarakat terdampak. Pendekatan ini berangkat dari kesadaran bahwa bencana tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga dampak sosial dan psikologis yang mendalam. Oleh karena itu, nilai keislaman dijadikan sebagai landasan etik dalam membangun empati dan solidaritas sosial, baik di tingkat kebijakan maupun di tingkat implementasi lapangan.

Temuan empiris menunjukkan bahwa dalam berbagai peristiwa bencana sosial, masyarakat Kota Padangsidimpuan merespons secara kolektif dengan semangat kebersamaan yang kuat. Tokoh masyarakat, H. Rusydi Nasution, menuturkan bahwa solidaritas masyarakat tidak dibatasi oleh perbedaan agama, etnis, maupun latar belakang sosial. Masjid dan lembaga keagamaan sering kali berfungsi sebagai pusat koordinasi bantuan sosial, tempat pengumpulan logistik, serta ruang konsolidasi sosial. Praktik ini menunjukkan bahwa institusi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang ritual, tetapi juga sebagai simpul sosial yang strategis dalam penanganan bencana. (Rusydi Nasution, komunikasi pribadi, t.t., hlm. Pada 8 Januari Pukul 09.25 Wib.)

Menariknya, penggunaan masjid sebagai pusat koordinasi bantuan sosial tidak bersifat eksklusif. Bantuan yang disalurkan melalui masjid dan lembaga keagamaan ditujukan kepada seluruh masyarakat terdampak tanpa membedakan identitas keagamaan. Praktik ini mencerminkan pemahaman Islam lokal yang menempatkan kemanusiaan sebagai prinsip universal. Nilai keislaman dalam konteks ini bertransformasi menjadi etika publik yang melampaui sekat-sekat identitas dan memperkuat kohesi sosial masyarakat multikultural. (Kementerian Agama RI, 2019, hlm. hlm. 43-47.)

Kebijakan sosial pemerintah daerah juga menunjukkan adanya sinergi antara negara dan masyarakat dalam penanganan bencana. Pemerintah daerah tidak memposisikan diri sebagai aktor tunggal, melainkan membuka ruang partisipasi bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan. Kolaborasi ini memperkuat efektivitas kebijakan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan ini mencerminkan praktik *collaborative governance* yang berbasis nilai lokal dan keagamaan.

Lebih jauh, nilai keislaman berperan sebagai sumber motivasi moral bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pemulihan pascabencana. Semangat tolong-menolong dan kepedulian sosial mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, penggalangan bantuan, serta pendampingan psikososial bagi korban bencana. Dalam hal ini, nilai keislaman tidak hanya memperkuat respons darurat, tetapi juga berkontribusi pada proses pemulihan sosial jangka panjang.

Dari perspektif Islam, penanganan bencana berbasis nilai keislaman dapat dipahami sebagai manifestasi dari ajaran Islam tentang tanggung jawab sosial dan kemanusiaan. Prinsip *ta'awun 'ala al-birr wa al-taqwa* menegaskan kewajiban kolektif umat manusia untuk saling membantu dalam kebaikan. (Mustaqim, 2015) Prinsip ini menemukan relevansinya dalam konteks kebijakan sosial, di mana pemerintah daerah berupaya menginstitutionalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam program dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat terdampak.

Dalam masyarakat multikultural, pendekatan ini memiliki signifikansi yang lebih luas. Penanganan bencana berbasis nilai keislaman yang inklusif mampu memperkuat solidaritas lintas kelompok dan mencegah fragmentasi sosial. Bencana, yang berpotensi memperbesar ketegangan sosial, justru menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan. Nilai keislaman dalam konteks ini berfungsi sebagai perekat sosial yang memperkuat ketahanan masyarakat. (Khilmi dkk., 2024)

Namun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa keberhasilan penanganan bencana berbasis nilai keislaman sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara nilai keagamaan dan prinsip inklusivitas. Ekspresi nilai keislaman yang terlalu simbolik berpotensi menimbulkan persepsi eksklusivitas, sementara pendekatan yang terlalu sekuler berisiko mengabaikan potensi nilai keagamaan sebagai sumber daya sosial. Oleh karena itu, pendekatan moderat dan kontekstual menjadi kunci keberhasilan integrasi nilai keislaman dalam kebijakan penanganan bencana.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sosial dan penanganan bencana berbasis nilai keislaman di Kota Padangsidempuan tidak hanya berkontribusi pada efektivitas respons darurat, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat multikultural. Nilai keislaman berfungsi sebagai fondasi etik yang memperkuat solidaritas, membangun empati, dan mendorong tanggung jawab kolektif. Dengan demikian, kebijakan sosial berbasis nilai keislaman dapat menjadi model alternatif dalam pengelolaan bencana dan krisis sosial di daerah-daerah multikultural lainnya.

Dinamika Multikulturalisme dan Strategi Moderasi Beragama

Multikulturalisme di Kota Padangsidempuan merupakan realitas sosial yang bersifat struktural dan historis, bukan sekadar keberagaman simbolik. Keberadaan berbagai kelompok etnis, latar belakang budaya, serta perbedaan afiliasi keagamaan membentuk konfigurasi sosial yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks ini, integrasi nilai-nilai keislaman dalam kebijakan sosial tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga keseimbangan antara identitas mayoritas Muslim dan hak-hak kelompok minoritas.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami multikulturalisme bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kondisi sosial yang harus dikelola melalui kebijakan yang sensitif terhadap perbedaan. Aparatur pemerintah daerah menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan sosial

agar tidak memunculkan kesan dominasi agama tertentu. Strategi ini tercermin dalam pemilihan bahasa kebijakan, bentuk program, serta mekanisme implementasi yang bersifat inklusif.

Moderasi beragama menjadi kerangka utama dalam mengelola dinamika multikultural tersebut. Moderasi tidak dipahami sebagai pelemahan identitas keislaman, melainkan sebagai cara mengaktualisasikan nilai Islam secara kontekstual dalam ruang publik yang plural. Pemerintah daerah, sebagaimana diungkapkan oleh Ginda Daulay, S.E., berupaya menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam prinsip umum seperti keadilan sosial, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. (Ginda Daulay, komunikasi pribadi, t.t., hlm. Pada 5 Januari Pukul 11.15 Wib.) Prinsip-prinsip ini kemudian dijadikan dasar kebijakan sosial yang dapat diterima oleh seluruh kelompok masyarakat.

Dalam praktiknya, moderasi beragama juga tercermin dalam relasi antara pemerintah daerah dan tokoh agama. Tokoh agama tidak hanya dilibatkan sebagai legitimasi simbolik, tetapi sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas sosial. (Susanti, 2022) Sofyan Souri Siregar menegaskan bahwa pesan-pesan keagamaan yang disampaikan kepada masyarakat selalu menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai serta menghindari sikap eksklusif dalam beragama. Dakwah dan ceramah keagamaan diarahkan untuk memperkuat kesadaran bahwa perbedaan merupakan bagian dari sunnatullah yang harus disikapi dengan bijak. (Sofyan Souri, komunikasi pribadi, t.t.)

Moderasi beragama di Padangsidempuan juga tampak dalam pengelolaan ruang-ruang sosial bersama. Dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk penanganan bencana dan program kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dan tokoh agama mendorong partisipasi lintas kelompok. Nilai keislaman yang dikedepankan bukan identitas ritual, tetapi etika kemanusiaan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama bukan sekadar wacana nasional, melainkan praktik lokal yang hidup dan operasional.

Namun demikian, moderasi beragama juga menghadapi tantangan internal. Sebagian kelompok masyarakat masih memandang moderasi sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip keagamaan. Persepsi ini menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman keagamaan yang tekstual dengan pendekatan kontekstual yang diambil oleh pemerintah daerah. Dalam situasi ini, peran tokoh agama menjadi sangat penting sebagai penafsir sosial ajaran Islam yang mampu menjembatani nilai normatif dan realitas multikultural.

Dengan demikian, dinamika multikulturalisme dan strategi moderasi beragama di Kota Padangsidempuan menunjukkan bahwa integrasi nilai keislaman dalam kebijakan sosial memerlukan pendekatan dialogis dan adaptif. Moderasi beragama berfungsi sebagai instrumen kebijakan sekaligus mekanisme sosial untuk menjaga harmoni dalam masyarakat plural.

Tantangan Struktural dan Kultural dalam Integrasi Nilai Keislaman

Meskipun integrasi nilai keislaman dalam kebijakan sosial menunjukkan berbagai capaian positif, penelitian ini menemukan adanya tantangan struktural dan kultural yang signifikan. Tantangan struktural terutama berkaitan dengan kapasitas institusional pemerintah daerah dalam menerjemahkan nilai-nilai keislaman ke dalam kebijakan yang operasional dan konsisten.

Secara struktural, tidak semua aparat pemerintah memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep Islam lokal dan kebijakan berbasis nilai. Nilai keislaman sering kali dipahami secara normatif dan abstrak, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam indikator kebijakan yang konkret. Akibatnya, integrasi nilai keislaman berpotensi berhenti pada tataran wacana tanpa implementasi yang terukur. Hal ini diakui oleh aparat pemerintah daerah bahwa belum terdapat panduan teknis yang sistematis mengenai integrasi nilai keagamaan dalam kebijakan sosial.

Tantangan struktural lainnya adalah keterbatasan koordinasi lintas sektor. Integrasi nilai keislaman menuntut kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Namun, koordinasi ini tidak selalu berjalan optimal karena perbedaan kepentingan dan prioritas antarinstansi. (Jayadi dkk., 2025) Dalam beberapa kasus, nilai keislaman hanya muncul dalam program tertentu dan tidak terintegrasi secara menyeluruh dalam kerangka kebijakan sosial.

Selain tantangan struktural, tantangan kultural juga menjadi faktor penting. Masyarakat Padangsidimpuan memiliki beragam persepsi mengenai peran agama dalam ruang publik. Sebagian masyarakat mengharapkan ekspresi keislaman yang lebih eksplisit dalam kebijakan sosial sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas mayoritas. Sebaliknya, kelompok lain cenderung menginginkan pemisahan yang tegas antara agama dan kebijakan publik. Perbedaan persepsi ini menciptakan ketegangan kultural yang harus dikelola secara hati-hati.

Tokoh masyarakat H. Rusydi Nasution menegaskan bahwa dalam konteks masyarakat multikultural, integrasi nilai keislaman harus dilakukan dengan pendekatan persuasif dan bertahap. Pemaksaan simbol atau narasi keagamaan yang berlebihan justru berpotensi memicu resistensi sosial. Oleh karena itu, pendekatan dialogis menjadi kunci dalam mengelola perbedaan pandangan masyarakat. (Rusydi Nasution, komunikasi pribadi, t.t.)

Tantangan kultural lainnya adalah adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk memandang nilai keislaman secara eksklusif. Pandangan ini dapat menghambat upaya integrasi nilai keislaman yang bersifat inklusif dan universal. (Anwar dkk., 2025) Dalam konteks ini, pendidikan sosial dan keagamaan yang menekankan nilai toleransi dan kebersamaan menjadi kebutuhan mendesak.

Dengan demikian, tantangan struktural dan kultural dalam integrasi nilai keislaman menunjukkan bahwa proses ini bersifat dinamis dan tidak pernah selesai. Integrasi nilai keislaman bukan sekadar persoalan kebijakan, tetapi juga proses sosial yang memerlukan kesabaran, dialog, dan pembelajaran berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi nilai keislaman sangat

bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun konsensus sosial di tengah keberagaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai keislaman dalam tata kelola kebijakan sosial Pemerintah Kota Padangsidimpuan berlangsung melalui pendekatan substantif dan kontekstual, bukan melalui formalisasi simbolik atau regulasi bercorak keagamaan. Nilai keislaman diinternalisasikan sebagai kerangka etik yang membimbing proses perumusan dan implementasi kebijakan sosial, khususnya dalam merespons dinamika masyarakat multikultural. Pendekatan ini memungkinkan nilai Islam hadir sebagai kekuatan moral yang inklusif dan adaptif terhadap pluralitas sosial.

Temuan empiris mengungkap bahwa Islam lokal memainkan peran strategis sebagai modal sosial dalam pengelolaan konflik dan penguatan kohesi sosial. Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam proses kebijakan sosial tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penyelesaian persoalan sosial melalui mekanisme dialog, musyawarah, dan pendekatan persuasif. Islam lokal, dalam konteks ini, berfungsi sebagai jembatan antara nilai normatif agama dan realitas sosial masyarakat yang majemuk.

Dalam konteks multikulturalisme, strategi moderasi beragama terbukti menjadi instrumen penting dalam menjaga harmoni sosial. Moderasi beragama tidak dimaknai sebagai pelemahan identitas keislaman, melainkan sebagai upaya menempatkan nilai Islam secara proporsional dalam ruang publik. Strategi ini memungkinkan kebijakan sosial pemerintah daerah diterima oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa menghilangkan nilai keislaman sebagai landasan etik kebijakan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan struktural dan kultural dalam integrasi nilai keislaman. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah dalam memahami dan menerjemahkan nilai keislaman secara kontekstual, serta perbedaan persepsi masyarakat mengenai peran agama dalam kebijakan publik, menjadi faktor yang memerlukan perhatian serius. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa integrasi nilai keislaman merupakan proses dinamis yang membutuhkan dialog berkelanjutan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan konsensus sosial.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai keislaman dalam kebijakan sosial pada masyarakat multikultural tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam membangun tata kelola kebijakan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Islam dan kebijakan publik, serta menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan sosial berbasis nilai yang sensitif terhadap konteks multikultural.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. (2017). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. The Wahid Institute.
- Anwar, W. T. L., Asmadi, S. Z., Handayani, I., Pratama, I. P., Daulay, H., & Dahlan, Z. (2025). Implementasi Nilai-nilai Wahdatul 'Ulum dalam Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Muslim. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2(1), 587–598. <https://doi.org/10.61253/kgq00e57>
- Aravik, H., Khasanah, N., & Hamzani, A. I. (2023). Islam in a Formal Legal Approach (Law); A Study of Theory and Implementation. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(1), 263–278. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31166>
- Aziz, A., & Mutakin, A. (2025). Perda bernuansa Syariah sebagai Instrumen Rekayasa Sosial Keluarga Islami: Tinjauan Sosiologi Hukum di Cianjur. *Alashriyyah*, 11(1), 69–86. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v11i1.235>
- Azra, A. (2015). *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*. Kencana.
- Gantika, S. (2025). IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DI INDONESIA: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 8(5), 1494–1505. <https://doi.org/10.31539/e4b62f77>
- Ginda Daulay. (t.t.). *Wawancara dengan Aparatur Pemerintah Daerah Kota Padangsidempuan* [Komunikasi pribadi].
- Indrayanti, W., Aisyah, S., & Sediyaningsih, S. (2025). Collaborative Governance dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 8(3), 296–314. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v8i3.14690>
- Jayadi, H., Wanandi, Z., & Kurniawan. (2025). Dialektika Otoritas Keagamaan dan Ilmu Pengetahuan dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah. *Aksioreligia*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v3i1.769>
- Kasiran. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. UIN Malang Press.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Khilmi, D. A. K., Findy, R. A., Isviana, P. S., & Radianto, D. O. (2024). MULTIKULTURALISME DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(2), 167–172. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i2.1193>
- Mustaqim, A. (2015). TEOLOGI BENCANA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 1(1). <https://doi.org/10.32495/nun.v1i1.9>
- Noeri, I., & Hoesein, Z. A. (2025). Integrasi Norma Hukum Islam (Norma Syariah) ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru). *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 37055–37064. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5895>

- Rikantasari, S., & Kholishudin, K. (2025). NILAI FILOSOFIS TANGGUNG JAWAB ; ETIKA DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 7(1), 34–52. <https://doi.org/10.35896/jse.v7i1.1021>
- Rusydi Nasution. (t.t.). *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kota Padangsidempuan* [Komunikasi pribadi].
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sofyan Soury. (t.t.). *Wawancara dengan Tokoh Agama Kota Padangsidempuan* [Komunikasi pribadi].
- Susanti, S. (2022). MODERASI BERAGAMA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 6(2), 168–182. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v6i2.1065>
- Sutrisno Hadi. (2019). *Metodologi Research, Jilid I, Cet. XXIV*. Andi Offset.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.